

# PEMBINAAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

LIVIA ANDINI PUTRI

NPP. 32.0219

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [AndiniPutri@gmail.com](mailto:AndiniPutri@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Mgs. Ismail, S.Pd, M.Si

## ABSTRACT

**Problem/Background (Gap):** The phenomenon of street children, homeless people, and beggars (*anjel-gepeng*) in Palembang City is a complex social problem. Their presence in public spaces continues to increase despite the existence of development policies from the Social Service Office. This condition reflects a gap between policy formulation and its implementation in the field, which is influenced by factors such as poverty, low education levels, and a lack of adequate work skills. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of guidance for street children, vagrants, and beggars by the Social Service Office of Palembang City based on the guidance theory which includes the dimensions of effort, process, and improvement. **Method:** A descriptive qualitative approach was used, with data collection through in-depth interviews, direct observation, and documentation. Data were collected to provide a clearer picture of the implementation of the guidance program and the challenges faced. **Results/Findings:** The Social Service Office of Palembang City carries out guidance activities including socialization, skills training, social mentoring, and regular evaluation. However, field implementation remains hampered by budget limitations, a shortage of personnel, and inadequate rehabilitation facilities. Outreach data show an increase in the number of male beggars from 52 cases (2022) to 89 cases (2024), along with low active participation from the target group due to high mobility and resistance to rehabilitation programs. **Conclusion:** Although the guidance provided by the Social Service Office is aligned with the theoretical framework, its effectiveness is not yet optimal. Technical barriers and lack of cross-sector coordination are factors that hinder the success of the program. Strengthening institutions and engaging the community on a continuous basis is needed to support social transformation for the *anjel-gepeng* group.

**Keywords:** Beggar, Guidance, Social Service, Street Children, Vagrants

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (*anjel-gepeng*) di Kota Palembang merupakan permasalahan sosial yang kompleks. Keberadaan mereka di ruang publik terus meningkat meskipun telah terdapat kebijakan pembinaan dari Dinas Sosial. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasinya di lapangan, yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta kurangnya keterampilan kerja yang memadai. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan

terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang berdasarkan teori pembinaan yang mencakup dimensi usaha, proses, dan perbaikan. **Metode:** Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program pembinaan dan tantangan yang dihadapi. **Hasil/Temuan:** Pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Palembang meliputi sosialisasi, pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, serta pendampingan dan evaluasi rutin. Namun, pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya personel, dan fasilitas rehabilitasi yang kurang memadai. Data penjangkauan menunjukkan peningkatan jumlah pengemis laki-laki dari 52 kasus (2022) menjadi 89 kasus (2024), serta rendahnya partisipasi aktif sasaran pembinaan akibat mobilitas tinggi dan resistensi terhadap program rehabilitasi. **Kesimpulan:** Meskipun pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah sesuai dengan kerangka teoritis, efektivitasnya belum maksimal. Hambatan teknis dan kurangnya koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang mengurangi keberhasilan program. Penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung transformasi sosial bagi kelompok anjal-gepeng.

**Kata Kunci :** Pengemis, Pembinaan, Dinas Sosial, Anak Jalanan, Gelandangan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjali-gepeng) di Kota Palembang merupakan permasalahan sosial yang kompleks. Kelompok ini, yang sebagian besar terdiri dari individu dengan latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, menghadapi tantangan besar dalam hal pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap peluang kerja yang layak. Fenomena ini erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Menurut Darma (2022), penanganan anak jalanan dan pengemis sering terkendala oleh pola hidup mereka yang sangat dinamis dan sering berpindah-pindah tempat, yang mempersulit upaya pendataan dan pembinaan yang lebih efektif. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Maharani dan Wahab (2024) yang menyebutkan bahwa dinamika mobilitas dan kurangnya keterlibatan aktif dari penerima manfaat menjadi hambatan utama dalam pembinaan oleh Dinas Sosial.

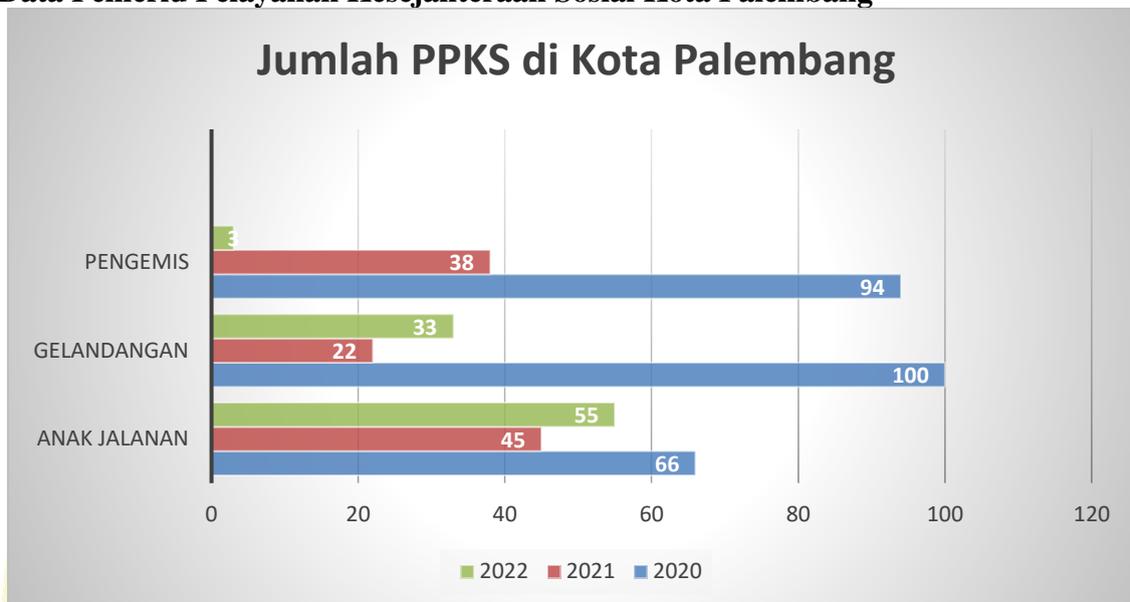
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang secara langsung berhubungan dengan munculnya fenomena sosial seperti anak jalanan dan pengemis. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak luput dari permasalahan ini. Dengan jumlah penduduk yang besar (1.718.440 pada tahun 2024), permasalahan sosial seperti ini semakin memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis menjadi landasan hukum dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pembinaan yang meliputi pemberdayaan, rehabilitasi sosial, serta perlindungan terhadap anak jalanan dan pengemis agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih layak. Upaya ini mencakup kegiatan seperti pendataan, pelatihan keterampilan, serta pemberian bantuan sosial lainnya.

Namun, meskipun ada regulasi yang mendasari tindakan pembinaan, implementasi di lapangan tidak berjalan dengan mudah. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial antara lain adalah keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas rehabilitasi yang

tidak memadai. Selain itu, masyarakat sendiri masih memiliki kesadaran yang rendah mengenai cara memberikan bantuan yang tepat, yang justru memperburuk kondisi para pengemis dan anak jalanan dengan memperpanjang ketergantungan mereka terhadap bantuan.

**Gambar 1.**  
**Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palembang**



Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang, 2024

Gambar 1 menunjukkan data terkait jumlah anak jalanan dan pengemis di Kota Palembang, memberikan gambaran terkait populasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Data ini memperlihatkan bahwa meskipun ada upaya pembinaan, jumlah pengemis dan anak jalanan di kota ini cenderung meningkat. Gambar ini mengilustrasikan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan dan efektif dari pihak berwenang.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Fenomena sosial yang melibatkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang menunjukkan adanya ketidaksielarasan dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar mereka, meskipun sudah ada peraturan yang mengaturnya. Kesenjangan yang terjadi mencakup perbedaan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, terdapat upaya untuk mengentaskan masalah ini melalui kebijakan yang mencakup rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap kelompok ini. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi tantangan besar.

Salah satu kesenjangan yang ada adalah antara kebijakan pemerintah dan kondisi nyata di lapangan. Meskipun ada upaya pembinaan yang diatur secara hukum, seperti pelatihan keterampilan dan penyuluhan sosial, hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di ruang publik yang menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya mendapatkan akses ke program-program yang telah disediakan. Selain itu, kendala lain yang dihadapi meliputi

keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan masalah koordinasi antara lembaga yang terlibat.

GAP penelitian ini terletak pada kurangnya evaluasi yang mendalam terhadap efektivitas program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Meskipun ada kebijakan yang jelas dan dasar hukum yang mendukung, efektivitas implementasi di lapangan masih perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dalam hal pelaksanaan sosialisasi, pelatihan keterampilan, dan evaluasi rutin yang belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pembinaan tersebut, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah banyak dilakukan di berbagai kota di Indonesia, memberikan gambaran penting terkait implementasi kebijakan sosial. Hidayah (2020) dalam penelitiannya mengenai implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar menemukan bahwa meskipun terdapat upaya pembinaan oleh Dinas Sosial, banyak kendala yang dihadapi, termasuk terbatasnya anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Penelitian serupa dilakukan oleh Asmara, Kariem, dan Kencana (2023), yang mengevaluasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, menemukan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan terkait dengan koordinasi antar lembaga dan keterbatasan fasilitas. Sementara itu, penelitian oleh Hajon et al. (2023) yang membahas penanggulangan masalah sosial di Kota Malang juga menunjukkan bahwa meskipun banyak lembaga yang terlibat, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial seringkali tidak berjalan optimal, yang mempengaruhi efektivitas kebijakan yang ada.

Penelitian lain oleh Wijayanti dan Kusdarini (2022) tentang penanggulangan pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Klaten memberikan penekanan pada pentingnya intervensi dari Satpol PP, yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam menangani kelompok tersebut. Satpol PP berperan dalam penegakan ketertiban umum, termasuk penertiban pelanggaran sosial seperti pengemis, gelandangan, dan anak jalanan (Eviany & Sutiyo, 2023). Berbeda dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan pada peran Dinas Sosial. Marif (2022) dalam penelitiannya tentang pembinaan sosial di Kota Surabaya juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis pemberdayaan individu, dimana pelatihan keterampilan dan peningkatan kesadaran sosial dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah sosial ini. Dengan berbagai hasil penelitian tersebut, kesenjangan yang terlihat adalah kurangnya fokus pada efektivitas implementasi pembinaan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini (Lumumba & Evans, 2017).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menyumbangkan kebaruan ilmiah dengan mengeksplorasi efektivitas program pembinaan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Palembang terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada kebijakan umum atau fenomena sosial ini, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai implementasi program pembinaan di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kelompok sasaran. Penelitian ini juga menggunakan teori pembinaan yang dikembangkan oleh Thoha (2003), yang mengedepankan dimensi

usaha, proses, dan perbaikan dalam pembinaan sosial. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih terstruktur dalam menganalisis pembinaan sosial yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah penerapan perspektif yang lebih spesifik dalam konteks Kota Palembang, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan stakeholder, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebijakan lokal dan tantangan implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah pengetahuan tentang pembinaan sosial terhadap kelompok rentan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang relevan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sosial di tingkat kota.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas implementasi kebijakan dan program-program pembinaan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan rehabilitasi sosial kelompok sasaran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan pembinaan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan sosial di Kota Palembang dan memperkaya kajian tentang pembinaan sosial dengan pendekatan teori yang lebih terstruktur, seperti yang dijelaskan oleh Thoha (2003) dalam dimensi usaha, proses, dan perbaikan dalam pembinaan sosial.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif untuk menggambarkan fenomena sosial secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam terhadap makna dan konteks permasalahan, bukan sekadar generalisasi data (Creswell, 2014). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, dengan validitas data dijaga melalui triangulasi metode (Flick, 2018 ; Bodley-Scott et al., 2024). Analisis dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program pembinaan (Braun & Clarke, 2006).

Operasional konsep penelitian ini mengacu pada efektivitas pembinaan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Konsep ini diukur melalui tiga dimensi utama: usaha, proses, dan perbaikan (Thoha, 2003). Dimensi usaha mencakup kegiatan pelatihan, pemberdayaan, dan penyuluhan; proses mencakup evaluasi dan pemantauan; sedangkan perbaikan berfokus pada perubahan perilaku dan kualitas hidup peserta. Indikator yang digunakan antara lain partisipasi peserta, peningkatan keterampilan, serta perubahan sosial yang terjadi pasca pembinaan.

Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pejabat Dinas Sosial serta kelompok sasaran, sedangkan data sekunder diambil dari dokumen, laporan, dan data instansi lain. Informan dipilih menggunakan purposive sampling dan snowball sampling untuk menjangkau narasumber yang relevan, seperti pejabat Dinas Sosial dan kelompok sasaran, dengan total 16 informan (Simangunsong, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yakni dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan validitas. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan pembinaan sosial oleh Dinas Sosial Kota Palembang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis**

Hasil penelitian ini merupakan kajian yang telah dianalisis menggunakan teknik analisis data yang relevan. Data yang diperoleh dari wawancara telah diolah menjadi satu kesatuan data dan fakta yang utuh. Penyajian hasil penelitian ini mencakup data yang dihasilkan langsung dari penelitian lapangan yang berlandaskan pada teori yang diterapkan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif, meliputi uraian dan kutipan langsung dari narasumber. Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang dianalisis dengan menggunakan teori Pembinaan yang dikemukakan oleh Miftah Thoha. Teori ini mengidentifikasi tiga dimensi utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan, yaitu Usaha, Proses, dan Perbaikan, yang kemudian diterapkan untuk menganalisis pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang.

##### **1. Dimensi Usaha**

Dimensi usaha dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk menangani masalah sosial ini dengan lebih efektif dan terstruktur. Berdasarkan teori pembinaan yang dikemukakan oleh Miftah Thoha, dimensi usaha memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembinaan. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial melibatkan beberapa langkah utama yang meliputi pendataan, pengawasan, sosialisasi, pemberian pelatihan keterampilan, serta pembinaan berkelanjutan.

Pendataan merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam usaha pembinaan ini. Dinas Sosial melakukan pendataan secara rutin setiap hari untuk memastikan data yang akurat mengenai jumlah, kondisi, serta lokasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Tim petugas yang terdiri dari 10 orang ini menyisir setiap kecamatan di Kota Palembang untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Data yang dihimpun ini menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam merancang program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Pengawasan yang dilakukan setelah pendataan bertujuan untuk memantau perkembangan kondisi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta memastikan bahwa mereka mengikuti program pembinaan yang sudah dirancang. Dinas Sosial juga melakukan pengawasan terhadap keberlanjutan program rehabilitasi yang telah dijalani oleh mereka.

Dalam wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Kota Palembang, beliau mengungkapkan berbagai tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Beliau menjelaskan bahwa meskipun Dinas Sosial berusaha mendata dan mengawasi anak jalanan serta gelandangan dan pengemis, praktiknya banyak tantangan yang mereka hadapi. Sebagian dari mereka menolak untuk didata karena khawatir akan ditertibkan atau dikirim ke panti sosial. Selain itu, pola hidup anak jalanan yang sangat dinamis, di mana mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, bahkan ke kota lain, membuat pemetaan yang akurat menjadi sangat sulit. Bapak Agus juga menjelaskan bahwa dengan terbatasnya jumlah personel yang ada, tim pengawas yang

terdiri dari 10 orang harus mengawasi seluruh wilayah Kota Palembang yang terbagi dalam 18 kecamatan, yang tentu saja tidak mudah. Oleh karena itu, beliau berharap ke depan ada penambahan personel dan kebijakan yang lebih tegas, tidak hanya dari sisi penertiban tetapi juga melalui pemberdayaan dan pembinaan agar mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan tidak kembali ke jalanan.

**Tabel 1.**

**Data Penjangkauan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Palembang**

<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anjal (Laki-laki)	38	41	6
Anjal (Perempuan)	17	25	0
Gelandangan (Laki-laki)	24	70	3
Gelandangan (Perempuan)	9	30	0
Pengemis (Laki-laki)	52	61	89
Pengemis (Perempuan)	17	33	26
<b>Jumlah</b>	<b>69</b>	<b>94</b>	<b>115</b>

*Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang, diolah oleh penulis*

Data dalam Tabel 1 menunjukkan penjangkauan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial selama periode 2022 hingga 2024. Dalam data tersebut, terlihat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan di seluruh kategori yang ada. Meskipun pendataan dan pengawasan dilakukan secara rutin, tantangan yang dihadapi sangat besar, terutama dalam hal mobilitas tinggi dari target sasaran dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

Setelah pendataan dan pengawasan, sosialisasi dan penyuluhan menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam usaha pembinaan ini. Dinas Sosial melakukan berbagai kegiatan sosialisasi di lokasi-lokasi yang strategis untuk menyampaikan pentingnya kehidupan yang lebih stabil dan jauh dari jalanan. Sosialisasi ini bertujuan agar anak jalanan dan pengemis lebih memahami bahaya kehidupan jalanan serta perlunya perubahan pola hidup. Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk tidak memberi uang langsung kepada pengemis atau anak jalanan, yang pada akhirnya hanya memperburuk keadaan mereka. Program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap kehidupan di jalanan. Sosialisasi juga difokuskan pada penyuluhan tentang alternatif kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Dinas Sosial menyediakan informasi mengenai program-program yang dapat diikuti, serta membagikan informasi terkait dengan layanan sosial yang bisa membantu mereka keluar dari kehidupan jalanan.

Selain itu, pencegahan dan rehabilitasi menjadi bagian integral dari usaha ini. Pencegahan berfokus pada upaya untuk mencegah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar tidak kembali ke jalanan setelah mengikuti program pembinaan. Pencegahan ini mencakup pemberian informasi yang mendalam tentang konsekuensi hidup di jalanan, serta memberi mereka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan keterampilan yang dapat mendukung kehidupan yang lebih baik. Rehabilitasi mencakup pelatihan keterampilan untuk membekali anak jalanan dan pengemis dengan kemampuan yang dapat membantu mereka mandiri secara ekonomi. Pelatihan ini meliputi keterampilan seperti menjahit, memasak, dan keterampilan lainnya yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pelatihan ini, diharapkan mereka dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan tidak kembali ke jalanan. Rehabilitasi juga mencakup pendampingan

psikologis untuk membantu mereka mengatasi trauma atau permasalahan pribadi yang membuat mereka terjebak dalam kehidupan jalanan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam usaha ini tidaklah kecil. Keterbatasan personel, sarana, dan prasarana yang ada di Dinas Sosial menjadi kendala dalam optimalisasi program ini. Meskipun begitu, Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan yang diberikan.

Secara keseluruhan, usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang menunjukkan progres yang positif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Pendekatan yang lebih terstruktur, serta pembinaan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam program ini. Diharapkan dengan adanya usaha yang lebih maksimal, jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat berkurang, dan mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

## **2. Dimensi Proses**

Dimensi proses dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang mencakup serangkaian langkah yang terstruktur dalam merancang dan melaksanakan program pembinaan. Proses ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kelompok yang menjadi target pembinaan. Dimensi proses ini melibatkan perencanaan program pembinaan, koordinasi dengan pihak terkait, serta pelaksanaan program yang terorganisir dengan baik.

Perencanaan Program Pembinaan merupakan langkah pertama dalam dimensi proses ini. Perencanaan yang baik adalah kunci utama untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang. Dinas Sosial merencanakan program pembinaan berdasarkan hasil pendataan dan pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi para penerima manfaat, seperti pelatihan keterampilan, pemberian akses pendidikan, serta layanan kesehatan dan psikologis.

Hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Firmansyah, S.E., M.Si., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palembang, menggarisbawahi bahwa perencanaan program pembinaan harus disusun dengan sangat hati-hati dan berbasis pada data yang akurat, dengan tujuan agar program tidak hanya menjadi solusi sementara. Beliau juga menyampaikan pentingnya bekerja sama dengan banyak pihak untuk mengatasi kendala seperti keterbatasan anggaran dan sulitnya mendata anak-anak yang terus berpindah-pindah.

Koordinasi dengan Pihak Terkait merupakan aspek penting dalam proses pembinaan. Program yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak terkait, baik di tingkat pemerintah daerah maupun lembaga non-pemerintah. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan, dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak jalanan, serta dengan LSM yang memiliki program rehabilitasi sosial dan keterampilan. Koordinasi ini penting agar program pembinaan dapat berjalan secara sinergis dan tidak tumpang tindih.

Dalam wawancara dengan Bapak Ahmad Ridwan, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palembang, beliau menjelaskan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak memang menjadi tantangan tersendiri. Beliau menyampaikan bahwa meskipun Dinas Sosial selalu berusaha menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani anak jalanan dan gelandangan, kenyataannya koordinasi ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak

instansi yang masih bekerja secara sektoral, dan terkadang prosedur birokrasi yang panjang membuat proses penanganan menjadi lebih lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan sosial tidak hanya memerlukan sinergi eksternal, tetapi juga reformasi birokrasi internal yang mendukung kecepatan pelayanan. menegaskan bahwa perampingan organisasi hanya akan efektif jika dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelayanan publik. Selain itu, beliau juga menyebutkan kesulitan dalam mendapatkan komitmen penuh dari masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ahmad Ridwan berharap ke depan ada sistem koordinasi yang lebih efektif agar semua pihak dapat bekerja sama secara lebih solid dan terpadu.

Pelaksanaan Program Pembinaan merupakan tahapan berikutnya yang melibatkan implementasi dari program yang telah direncanakan. Program pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah pelatihan keterampilan, pendampingan psikologis, pemberian akses pendidikan, dan program kesehatan. Pelaksanaan program ini memerlukan dukungan sumber daya yang cukup, baik dari sisi personel, sarana, maupun anggaran.

Dalam wawancara dengan Ibu Siti Rahma, seorang pekerja sosial di Panti Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Palembang, beliau menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan program pembinaan adalah membangun kepercayaan anak-anak jalanan terhadap sistem pembinaan yang diberikan. Banyak anak yang masuk ke panti rehabilitasi awalnya menolak mengikuti program pembinaan karena mereka merasa lebih bebas di jalan. Mereka sudah terbiasa hidup tanpa aturan, sehingga ketika diminta untuk menjalani jadwal yang teratur, mereka merasa terkekang. Namun, bagi mereka yang bertahan dan mau belajar, Ibu Siti Rahma menyebutkan bahwa ada perubahan yang luar biasa. Anak-anak yang awalnya tidak memiliki harapan, kini bisa bekerja dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun tantangan dalam pelaksanaan program pembinaan cukup besar, banyak penerima manfaat yang dapat merasakan perubahan signifikan jika mereka berkomitmen untuk mengikuti program rehabilitasi.

### **3. Dimensi Perbaikan**

Dimensi perbaikan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palembang berfokus pada penguatan dan peningkatan efektivitas dari program-program yang telah dijalankan. Peningkatan kualitas dalam program pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata bagi kelompok yang menjadi target pembinaan. Dimensi perbaikan ini mencakup beberapa langkah strategis, yaitu pembangunan panti rehabilitasi, peningkatan peran masyarakat dalam pembinaan, dan penerapan digitalisasi data serta sistem pemantauan yang lebih efisien.

Pembangunan panti rehabilitasi menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas program pembinaan. Panti rehabilitasi berfungsi sebagai pusat pemulihan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, tempat mereka mendapatkan layanan sosial dan psikologis yang dibutuhkan untuk memulai hidup baru. Pembangunan panti ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga untuk menyediakan program rehabilitasi yang terstruktur, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pemulihan psikologis.

Selama ini, panti rehabilitasi yang ada di Kota Palembang telah menunjukkan kontribusi positif dalam proses pembinaan, meskipun masih ada kekurangan dalam hal

fasilitas yang dapat mendukung proses rehabilitasi secara optimal. Dinas Sosial terus berupaya melakukan perbaikan fasilitas panti rehabilitasi agar para penerima manfaat dapat menjalani program pembinaan dengan lebih baik. Pembenahan panti rehabilitasi tidak hanya mencakup peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga perbaikan dalam hal program-program pelatihan yang diberikan. Peningkatan kualitas fasilitas panti rehabilitasi diharapkan dapat mendukung anak jalanan dan pengemis dalam memperoleh keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka ke depan. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik, proses rehabilitasi diharapkan lebih efektif, memungkinkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada kehidupan jalanan.

Peningkatan peran masyarakat dalam pembinaan merupakan langkah strategis yang tidak kalah penting dalam memperkuat dampak dari program pembinaan ini. Dinas Sosial Kota Palembang menyadari bahwa pembinaan yang efektif tidak hanya melibatkan instansi pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam mendukung keberhasilan program ini. Masyarakat yang peka terhadap masalah sosial dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah.

Program pembinaan yang melibatkan masyarakat juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberikan dukungan yang lebih luas kepada anak jalanan dan pengemis, termasuk dalam bentuk pekerjaan atau kegiatan produktif lainnya. Dengan adanya peningkatan peran masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap mereka, mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan langsung, serta mempercepat proses reintegrasi sosial mereka. Masyarakat yang aktif dalam pembinaan akan memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Dinas Sosial berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembinaan, mulai dari tahap sosialisasi hingga implementasi program. Masyarakat yang terlibat langsung dalam pembinaan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menciptakan perubahan dalam kehidupan anak jalanan dan pengemis. Program pemberdayaan masyarakat ini juga dapat menciptakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk memecahkan masalah sosial yang ada, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

Penerapan digitalisasi data dan sistem pemantauan menjadi langkah inovatif yang sangat dibutuhkan dalam memperbaiki dan meningkatkan efisiensi program pembinaan. Dengan adanya digitalisasi, Dinas Sosial dapat mengelola dan memantau data dengan lebih efisien dan akurat. Sistem berbasis teknologi informasi ini memungkinkan Dinas Sosial untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data penerima manfaat secara real-time, yang akan mempercepat pengambilan keputusan dalam merancang kebijakan dan program lebih lanjut.

Salah satu keunggulan dari digitalisasi data adalah memudahkan dalam memantau perkembangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang telah mengikuti program pembinaan. Dengan menggunakan sistem pemantauan digital, Dinas Sosial dapat mengetahui status mereka dengan lebih cepat, baik dalam hal rehabilitasi keterampilan maupun perkembangan sosial lainnya. Hal ini juga memungkinkan adanya penyesuaian program secara lebih cepat jika ditemukan kendala atau kebutuhan baru yang perlu diakomodasi dalam proses pembinaan.

Selain itu, digitalisasi juga memfasilitasi sistem pelaporan yang lebih transparan dan dapat diakses oleh berbagai pihak terkait. Dengan sistem pemantauan yang lebih canggih, Dinas Sosial dapat mengevaluasi efektivitas program pembinaan secara lebih akurat, serta melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan program pembinaan akan menjadi lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi tersebut sangat bergantung pada kesiapan masyarakat sebagai pengguna.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini mengungkapkan berbagai tantangan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang, yang sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai masalah sosial serupa di berbagai daerah. Penelitian ini menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam merancang dan melaksanakan program pembinaan yang efektif, khususnya dalam hal pendataan yang akurat, pengawasan yang memadai, serta koordinasi yang terbatas antara berbagai instansi terkait.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hidayah (2020) di Makassar, menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah untuk menangani permasalahan sosial ini, faktor-faktor struktural seperti kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan masih menjadi hambatan utama. Temuan serupa ditemukan di Palembang, di mana meskipun Dinas Sosial Kota Palembang telah melakukan berbagai langkah pembinaan, tantangan terbesar terletak pada mobilitas tinggi dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang terus berpindah-pindah, serta ketidakmauan mereka untuk didata atau mengikuti program rehabilitasi.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan daerah yang mendukung program pembinaan seperti Perda Kota Palembang No. 12/2013, pelaksanaannya masih terbatas oleh keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun fasilitas. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Tetti Asmara et al. (2023) yang juga mencatat bahwa sumber daya yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam efektivitas program pembinaan.

Marif Marif (2022) juga dalam penelitiannya mengenai kebijakan sosial di Indonesia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah yang lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan penanganan masalah anak jalanan sangat bergantung pada kebijakan yang tidak hanya berbasis pada penertiban, tetapi juga melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa perbaikan kebijakan di tingkat lokal sangat diperlukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan reintegrasi anak jalanan ke dalam masyarakat.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Kasian Hajon, Eri Yusnita Arvianti, dan Cahyo Sasmito (2023) mengenai pembinaan sosial di perkotaan menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem yang efektif untuk menangani anak jalanan. Mereka menemukan bahwa kolaborasi yang terbuka antara instansi-instansi terkait dapat mempercepat proses pengalihan anak jalanan ke panti rehabilitasi dan meningkatkan kualitas pembinaan. Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya koordinasi, masih banyak kendala birokrasi yang memperlambat proses tersebut.

Penelitian lain oleh Diyah Puspita Wijayanti dan Eny Kusdarini (2022) juga mencatat bahwa dalam program-program pembinaan sosial, tantangan terbesar adalah mengatasi resistensi dari anak jalanan yang merasa lebih bebas di jalanan dibandingkan dengan aturan yang diterapkan di panti rehabilitasi. Mereka menggarisbawahi bahwa keberhasilan program rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh fasilitas atau pelatihan keterampilan yang diberikan, tetapi juga oleh kemauan individu untuk berubah dan mengikuti program yang ada. Hal ini sejalan dengan temuan Tanjung dan Wiredarne (2024), yang menyatakan bahwa penegakan ketertiban oleh Satpol PP tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga membutuhkan strategi pembinaan sosial yang persuasif agar dapat membentuk perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Temuan ini juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana tantangan terbesar dalam pelaksanaan program pembinaan adalah membangun kepercayaan anak jalanan terhadap sistem pembinaan yang ada.

#### IV. KESIMPULAN

Dinas Sosial Kota Palembang telah melaksanakan berbagai upaya pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan sumber daya manusia bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dimulai dengan sosialisasi dan komunikasi langsung kepada mereka, yang melibatkan keluarga dan pejabat setempat, program ini mengacu pada peraturan daerah yang ada. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan layanan publik berupa administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta jaminan keamanan dan keselamatan. Dalam dimensi proses, pembinaan difokuskan pada pendampingan pribadi, pengembangan keterampilan, peningkatan kemampuan interpersonal, serta dukungan emosional, dengan evaluasi yang terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas program. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perkembangan dalam keterampilan kerja, perubahan tingkah laku, dan motivasi untuk meraih tujuan hidup yang lebih baik. Dalam dimensi perbaikan, perubahan yang terlihat pada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dalam hal tingkah laku, interaksi sosial, serta pola berpikir yang lebih positif memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup mereka dan lingkungan sekitar yang menjadi lebih damai dan bersih. **Keterbatasan penelitian ini**, terutama terkait dengan jumlah sampel yang terbatas, keterbatasan waktu yang digunakan untuk mengamati perubahan jangka panjang, serta kesulitan dalam mengakses data yang lebih mendalam terkait efektivitas program dalam jangka waktu yang lebih panjang. **Arah masa depan penelitian** ini dapat difokuskan pada pengembangan metodologi yang lebih luas, dengan melibatkan lebih banyak sampel, serta mengkaji lebih lanjut dampak jangka panjang dari program pembinaan terhadap perubahan sosial dan ekonomi anak jalanan dan pengemis di Kota Palembang.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palembang, serta seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi yang sangat berharga selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam kelancaran dan kesuksesan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan dukungan moral dan material demi tercapainya tujuan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, T., Kariem, M. Q., & Kencana, N. (2023). Evaluasi kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam penanganan gelandangan dan pengemis. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 12(2), 135-150.
- Bodley-Scott, E., Ward, R. J., Tarabay, J., Fagbamigbe, A. F., Barker, S., & Maguire, N. (2024). The effectiveness of psychological interventions for people experiencing homelessness: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 34(5), e2863.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Darma, S. L. (2022). Penertiban anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. Nas Media Pustaka.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Hajon, Y. K., et al. (2023). Implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 8(3), 75-90.
- Hidayah, E. S. (2020). Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 22-35. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1103>
- Lumumba, L., & Evans, O. (2017). The effectiveness of rehabilitation interventions on street children's social development in Kakamega Central Sub-County, Kenya. *Developing Country Studies*, 7(1), 1-10.
- Maharani, A. C., & Wahab, A. (2024). *PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Marif, M. (2022). Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. *Amsir Law Journal*, 4(1), 96-111.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Tanjung, K. D., & Wiredarme, W. (2024). *Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Thoha, M. (2003). *Manajemen Pembinaan Sumber Daya Manusia: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wijayanti, D. P., & Kusdarini, E. (2022). Penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Klaten. *AGORA*, 11(4), 421-436.